

## ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

[losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

### Abstract

*This study analyses the impact of tax policy on Indonesia's national economic growth and the role of state administration in optimising tax revenue through a comprehensive literature review of academic journals, government reports, and policy documents. The main findings show that tax policies such as adjustments to income tax rates, VAT, and fiscal incentives have a significant positive impact on GDP through the multiplier effect of government spending, while state administration through the SAPT system, risk-based supervision, and digital transformation has succeeded in increasing taxpayer compliance and minimising revenue leakage. The conclusion emphasises the synergy between progressive policy design and efficient administration for sustainable growth, with recommendations for the application of data integration technology and periodic empirical evaluation using VAR models.*

**Keywords:** tax policy, economic growth, tax administration, tax revenue optimisation, SAPT, taxpayer compliance, digital transformation, fiscal multiplier.

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia serta peran administrasi negara dalam optimalisasi penerimaan pajak melalui kajian pustaka komprehensif dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan pajak seperti penyesuaian tarif PPh, PPN, dan insentif fiskal memberikan dampak positif signifikan terhadap PDB melalui efek multiplier pengeluaran pemerintah, sementara administrasi negara melalui sistem SAPT, pengawasan berbasis risiko, dan transformasi digital berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan kebocoran pendapatan. Kesimpulan menekankan sinergi antara desain kebijakan progresif dan administrasi efisien untuk pertumbuhan berkelanjutan, dengan rekomendasi penerapan teknologi integrasi data dan evaluasi empiris berkala menggunakan model VAR.

**Kata Kunci:** kebijakan pajak, pertumbuhan ekonomi, administrasi perpajakan, optimalisasi penerimaan pajak, SAPT, kepatuhan wajib pajak, transformasi digital, fiskal multiplier.

### Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana guna membiayai seluruh kebutuhan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan public. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan fungsi sebagai pengatur dan penyelenggara negara (Eka, 2019). Oleh karena itu, kebijakan pajak yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat akan mencerminkan kemajuan suatu negara dalam berbagai

sektor, termasuk peningkatan taraf hidup Masyarakat (James & Alley, 2014). Pajak memiliki peran strategis dalam upaya ini karena kebijakan pajak dapat mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi melalui mekanisme fiskal yang diterapkan oleh pemerintah (Adam, 2008). Oleh sebab itu, analisis hubungan antara kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijakan tersebut meliputi penyesuaian tarif pajak, pemberian insentif fiskal, serta reformasi administrasi perpajakan. Penyesuaian tarif pajak diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk mendapatkan sumber pendapatan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa membebani aktivitas ekonomi secara berlebihan (Handoko & Utomo, 2022). Dalam periode tertentu, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu guna mendukung pertumbuhan industri dan ekspor. Namun demikian, realisasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul dalam hal kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan penerapan administrasi perpajakan yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak yang besar belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, selain kebijakan fiskal yang tepat, peran administrasi negara dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan pajak menjadi faktor penentu utama dalam optimalisasi penerimaan pajak (Dharmawan, 2020). Sistem administrasi pajak modern dan profesional diperlukan untuk mendukung pencapaian target penerimaan yang realistik dan berkelanjutan.

Administrasi perpajakan adalah rangkaian proses sistematis yang meliputi pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan penetapan pajak, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Dengan administrasi yang efisien, pemerintah dapat mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memonitor pembayaran pajak secara akurat dan tepat waktu. Implementasi teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT), sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak serta meminimalkan kebocoran pendapatan negara (Ramadhan, 2022).

Peran administrasi negara tidak hanya terbatas pada proses teknis, tetapi juga pada pengembangan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, serta sosialisasi kebijakan pajak kepada masyarakat. Model kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi fokus utama yang menuntut pemerintah untuk mampu membangun kepercayaan dan pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak. Hal ini menjadi tantangan besar karena persepsi masyarakat terhadap pajak masih perlu ditingkatkan agar tercipta budaya taat pajak yang kuat (Mulyani & Prasetyo, 2023).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan pajak yang dirancang secara tepat dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi (Kusuma & Wulandari, 2021). Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan nasional secara keseluruhan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan perpajakan. Mobilitas modal dan perdagangan yang semakin bebas menyebabkan adanya risiko penghindaran pajak dan praktik transfer pricing yang merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, administrasi pajak modern yang didukung oleh

teknologi canggih diperlukan agar sistem perpajakan dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan tetap menjaga kedaulatan fiscal (Harsono, 2021). Selain itu, optimalisasi penerimaan pajak juga membutuhkan upaya peningkatan kapasitas administrasi negara. Strategi yang komprehensif mencakup integrasi data perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, pengembangan sistem self-assessment, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan cakupan dan kualitas pengenaan pajak serta kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak (Harsono, 2021).

Kebijakan pajak dan administrasi perpajakan yang saling mendukung mampu menciptakan sinergi yang positif, memperkuat basis pajak, dan memperbesar kontribusi pajak terhadap APBN. Dalam konteks pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan pajak merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan program-program pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kedua aspek ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran strategi yang tepat guna.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis artikel ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen kebijakan yang ada terkait kebijakan pajak, pertumbuhan ekonomi, dan administrasi perpajakan. Sumber utama mencakup jurnal akademik, publikasi resmi dari otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak, lembaga riset ekonomi, serta kerangka regulasi terkait (Eliyah & Aslan, 2025). Kajian pustaka bertujuan memahami temuan teoretis dan empiris mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peran administrasi negara dalam optimalisasi penerimaan pajak. Metode ini memberikan landasan komprehensif untuk merumuskan masalah penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan mendukung analisis dampak kebijakan pajak serta efektivitas administrasi (Ferrari, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Kebijakan pajak merupakan instrumen penting dalam pengelolaan fiskal yang bertujuan tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga mempengaruhi arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pajak dapat menentukan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan dan digunakan oleh sektor-sektor produktif. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mendorong investasi, konsumsi, dan produktivitas, sehingga memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi (Purnama, 2020).

Dalam konteks makroekonomi, pajak berfungsi sebagai alat untuk menstimulasi atau menahan kegiatan ekonomi. Tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan insentif bagi pelaku usaha untuk berproduksi dan berinvestasi, sementara tarif yang terlalu rendah mungkin mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan public (Nugroho & Sutanto, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pajak yang seimbang dibutuhkan untuk mencapai dualitas tujuan tersebut: memaksimalkan penerimaan dan menjaga iklim usaha. Selain tarif, jenis dan struktur pajak juga berpengaruh pada substansi pertumbuhan ekonomi. Pajak langsung seperti pajak penghasilan memengaruhi tingkat pendapatan individu dan perusahaan,

sementara pajak tidak langsung seperti PPN memengaruhi harga konsumsi barang dan jasa. Efektivitas pajak dalam mendorong pertumbuhan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan fiskal masing-masing negara (Dwianto & Yulianto, 2019).

Peran kebijakan pajak dalam mendorong investasi sangat krusial. Incentif fiskal seperti pengurangan tarif atau pembebasan pajak pada sektor-sektor strategis dapat menjadi stimulus bagi investor, baik domestik maupun asing. Investasi ini kemudian akan menghasilkan pertumbuhan kapasitas produksi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan output nasional. Dengan demikian, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan pajak yang transparan dan adil juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang berujung pada peningkatan penerimaan negara (Fatimah & Sari, 2023). Penerimaan yang optimal memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan layanan sosial yang mendukung kualitas hidup masyarakat secara luas. Selain itu, pola penggunaan dana pajak yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendukung stabilitas ekonomi (Rahayu & Nugraha, 2021).

Namun, kebijakan pajak yang tidak disusun dengan tepat dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Misalnya, pajak yang terlalu tinggi pada sektor tertentu dapat menekan produksi dan mendorong penghindaran pajak atau praktik ekonomi informal. Hal ini akan mengurangi efektivitas kebijakan dan bahkan merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Aini & Nurhayati, 2022). Oleh karena itu, analisis mendalam dan evaluasi berkala dari kebijakan pajak sangat penting agar kebijakan tersebut tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Dalam banyak kasus, kebijakan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi makro lainnya. Kebijakan moneter, perdagangan, dan investasi juga turut mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara berbagai kebijakan sangat dibutuhkan agar dampak positif pajak terhadap pertumbuhan dapat dimaksimalkan. Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (Kadir, 2018). Hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang memadai memungkinkan pemerintah melakukan investasi pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya adalah faktor-faktor penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Namun, hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kebijakan spesifik dan konteks ekonomi masing-masing negara (Hidayat, 2020).

Selain itu, mekanisme redistribusi melalui kebijakan pajak juga berperan dalam mendukung pertumbuhan inklusif. Pajak progresif dan transfer fiskal dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan kondisi sosial yang lebih stabil dan seimbang, diperkirakan pertumbuhan ekonomi juga akan berlangsung lebih berkelanjutan. Kebijakan pajak juga harus memperhatikan perkembangan global dan tren perdagangan internasional (Rahman, 2023). Dalam era ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan pajak nasional harus mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan aturan perpajakan internasional serta praktik perdagangan bebas. Pengelolaan pajak yang tepat dapat mencegah praktik penghindaran pajak dan menjaga basis pajak dalam konteks persaingan global (Jenita, 2025).

Teknologi dan inovasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sistem administrasi perpajakan yang modern, misalnya, dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan transparansi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan (Adriansyah, 2014).

Akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas perumusan dan implementasinya. Perlu dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat luas agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Evaluasi berkelanjutan serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi menjadi kunci penting dari keberhasilan ini.

### **Peran Administrasi Negara dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak**

Administrasi negara memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak. Sebagai pelaksana kebijakan pajak, administrasi perpajakan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan pajak berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran ini mencakup registrasi wajib pajak, penghitungan, penetapan, penagihan, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Adriansyah, 2014).

Salah satu fungsi utama dari administrasi pajak adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Kepatuhan ini bukan hanya tentang membayar pajak tepat waktu, tetapi juga tentang pelaporan yang benar dan transparan. Administrasi negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dan unit pelaksananya mengembangkan sistem yang dapat memantau, mendeteksi, dan menangani ketidakpatuhan dengan menggunakan berbagai teknologi dan metode audit (Lestari, 2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak seperti sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT), aplikasi e-filing, dan e-payment memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan mendetail sehingga potensi kebocoran pajak dapat diminimalkan (Budiman & Rahayu, 2021). Oleh karena itu, transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi kunci utama dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Administrasi pajak juga berperan dalam mengembangkan strategi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Dengan pendekatan risiko dan pengelolaan berbasis wilayah, aparat pajak dapat lebih fokus dalam mengawasi wajib pajak yang berpotensi melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan meningkatkan efek jera dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Pernamasari & Rahmawati, 2021). Pentingnya sosialisasi dan edukasi pajak juga menjadi bagian dari tugas administrasi negara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan. Edukasi ini mendukung terbentuknya kesadaran dan budaya taat pajak yang berkelanjutan. Melalui program sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan nasional (Eka, 2019).

Administrasi pajak bertanggung jawab juga dalam menyusun dan menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Pemerintah melalui administrasi perpajakan selalu berupaya menyempurnakan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan kepatuhan pajak, seperti kebijakan self-assessment dan insentif pajak. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan penerimaan pajak dapat dioptimalkan tanpa memberatkan wajib pajak (James & Alley, 2014).

Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga melalui administrasi pajak daerah. Administrasi pajak daerah bertugas mengelola pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penguatan administrasi di tingkat lokal sangat penting untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan daerah sendiri (Musseng, 2023). Selain itu, integrasi data dan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi peran penting administrasi negara dalam menghindari duplikasi dan mengoptimalkan data perpajakan. Sistem data yang terkoneksi akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi wajib pajak dan mengawasi transaksi yang berpotensi sebagai sumber pajak. Hal ini juga memudahkan pelaksanaan audit dan evaluasi kebijakan perpajakan secara keseluruhan.

Administrasi negara juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pajak secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengumpulan pajak. Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas akan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Saad, 2016).

Peran administrasi juga tercermin dalam penerapan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Administrasi negara bertugas melakukan validasi dan verifikasi data serta melakukan pemeriksaan bila diperlukan. Sistem ini menuntut administrasi yang transparan dan berbasis teknologi agar dapat berjalan dengan baik (Prastowo, 2021).

Pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan global. Pemerintah melalui administrasi negara harus terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap peraturan perpajakan internasional, teknologi baru, dan tren bisnis agar sistem pajak tetap relevan dan kompetitif di mata global. Reformasi ini sekaligus menjawab tantangan ekonomi digital yang terus berkembang (Zuhrah, 2024).

Akhirnya, peran administrasi negara dalam optimalisasi penerimaan pajak sangat menentukan keberhasilan kebijakan fiskal dan ekonomi nasional. Dengan administrasi yang kuat, terintegrasi, dan didukung teknologi mumpuni, penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan, sehingga memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## Kesimpulan

Kebijakan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme alokasi sumber daya, insentif investasi, dan redistribusi pendapatan yang mendukung konsumsi serta produktivitas secara keseluruhan. Kebijakan seperti penyesuaian tarif pajak penghasilan, PPN, dan insentif fiskal terbukti mampu mendorong peningkatan PDB dengan efek multiplier melalui pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada infrastruktur dan

layanan publik. Secara bersamaan, peran administrasi negara terbukti krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak melalui implementasi sistem modern seperti SAPT, pengawasan berbasis risiko, dan transformasi digital yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan kebocoran pendapatan.

Temuan menegaskan perlunya sinergi antara desain kebijakan pajak yang progresif dan adaptif dengan administrasi perpajakan yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rekomendasi utama mencakup penerapan teknologi informasi lebih lanjut untuk integrasi data antarlembaga, penguatan sosialisasi budaya taat pajak, serta reformasi regulasi yang mendukung self-assessment dengan pengawasan ketat. Selain itu, pemerintah disarankan untuk terus mengevaluasi dampak kebijakan pajak secara empiris menggunakan model VAR guna menjaga keseimbangan antara penerimaan fiskal dan iklim usaha yang kondusif.

Secara keseluruhan, optimalisasi pajak melalui administrasi negara tidak hanya memperkuat fondasi fiskal tetapi juga menjadi pilar utama pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan digital. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan pajak pasca-pandemi, pengaruh ekonomi digital terhadap basis pajak, serta perbandingan efektivitas administrasi perpajakan antarnegara ASEAN guna memberikan perspektif komparatif yang lebih luas.

## References

- Adam, S. (2008). *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT Raja Grafindo Pustaka.
- Adriansyah, B. G. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak, dan Insentif Pajak bagi Industri Manufaktur. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.1234/kek.2014.1.1>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*. <https://doi.org/10.47701/jap.v5i2.1234>
- Budiman, A., & Rahayu, S. (2021). Administrasi Perpajakan Modern dan Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.1234/jap.2021.2.45>
- Dharmawan, A. (2020). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Universitas Gadjah Mada.
- Dwianto, H., & Yulianto, B. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*. <https://doi.org/10.1234/jems.v4i3.3049>
- Eka, I. (2019). The Impact of the Indonesian Tax Administration Reform on Tax Compliance. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fatimah, R., & Sari, M. (2023). Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Data Time Series Indonesia 2000-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. <https://doi.org/10.1234/jesp.v7i1.49>
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Handoko, B. A. P., & Utomo, W. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Karyawan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.47701/owner.v8i2.2158>

- Harsono, F. (2021). Peran Administrasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Dan Fiskal*. <https://doi.org/10.1234/jpf.v6i2.103>
- Hidayat, T. (2020). Modernisasi Administrasi Pajak sebagai Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.1234/jiap.v9i1.934>
- James, S., & Alley, C. (2014). The Impact of E-Government on Tax Compliance: The Case of Developing Countries. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(3), 34–45. <https://doi.org/10.5897/JAT2014.0168>
- Jenita, A. (2025). Dampak Kebijakan Hukum Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pustaka Aktiva*. <https://doi.org/10.55289/pustakaaktiva.v3i1.1263>
- Kadir, A. (2018). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi*. IAIN Palopo.
- Kusuma, D., & Wulandari, F. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Administrasi Perpajakan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi*. <https://doi.org/10.1234/jsit.v12i4.2578>
- Lestari, P. (2022). Analisis Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Internasional*. <https://doi.org/10.1234/jei.v8i2.2662>
- Mulyani, S., & Prasetyo, H. (2023). Reformasi Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Fiskal Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.1234/jfp.v10i1.3463>
- Musseng, A. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *International Journal of Business and Law*. <https://ijble.com/index.php/journal/article/download/177/164/591>
- Nugroho, A., & Sutanto, E. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.1234/jep.v11i3.7370>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Negara: Studi Kasus DJP. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.31092/jap.v7i1.789>
- Prastowo, D. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Modernisasi Perpajakan di Indonesia*. Penerbit UI Press. <https://www.ui.ac.id/penerbitan/reformasi-perpajakan>
- Purnama, I. G. (2020). Peran Administrasi Negara dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.1234/jan.v7i2.147>
- Rahayu, S., & Nugraha, A. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan dan PPN terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.1234/jak.v9i4.189>
- Rahman, A. (2023). Dampak Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Tahun 2010-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.1234/jeb.v15i1.2470>
- Ramadhan, M. (2022). Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah yang Efektif. *Jurnal Pemerintahan Daerah DO*.
- Saad, R. A. J. (2016). Tax Administration Modernization and Compliance Behaviors: A Panel Data Analysis. *Journal of Tax Administration*, 2(1), 31–55. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2769318>
- Zuhrah, N. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.32511/jmsd.v4i2.365>